

**STUDI KEUNGGULAN KOMPATARIF DAN KOMPETITIF
KOMODITAS BAWANG PUTIH DAN DAMPAK KEBIJAKAN
PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGANNYA DI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

***The Study of Comparative and Competitive Advantages of
Garlic and the Impacts of Government Policies on Garlic
Expansion in East Lombok District***

Bambang Dipokusumo

Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNRAM

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1). Mengkaji keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas bawang putih di Kabupaten Lombok Timur. 2). Mengkaji dampak dari kebijakan makro pemerintah dalam hal penarikan subsidi dan liberalisasi perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, khususnya di Kecamatan Sembalun sebagai daerah sampel dan menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) sebagai alat analisis utama. Adapun temuan dari hasil penelitian ini adalah: 1). Agribisnis bawang putih di Kabupaten Lombok Timur, memiliki daya saing dari aspek keunggulan komparatif dan kompetitif dengan nilai DRCR dan PCR masing-masing sebesar 0,90 dan 0,72. 2). Kebijakan pemerintah dalam pasar input dan pasar output secara keseluruhan memberikan dampak positif berupa insentif bagi petani produsen bawang putih dengan keuntungan bersih sebesar Rp.4.206.793,- per hektar atau 389% dari keuntungan bersih yang seharusnya. Untuk mendukung pengembangan agribisnis bawang putih diharapkan keterlibatan pemerintah dalam promosi pasar dan dukungan paket kebijakan pada investor dan eksportir.

ABSTRACT

The research has objectives 1). To examine comparative and competitive advantages of garlic in East Lombok District. 2). To examine the impact of government policies - in term of reducing input subsidize and liberazation – on garlic expansion. This research was conducted in East Lombok District and used descriptive method and Policy Analysis Matrix as the main analysis tool. The research conclude that 1). Garlic agribusiness has competition power in term of comparative and competitive advantages in which DRCR and PCR coefficient were 0,90 and 0,72 respectively. 2). Government policies, in general, have had positive impact on profit where farmers' net revenue from garlic increased to Rp. 4.206.793,- per hektar or 389 % of farmers' profit without government policies.

Kata Kunci : Keuntungan komparatif dan kompetitif

Key Words : Comparative and competitive advantage

For supporting garlic agribusiness growth it is suggested that government should take such interventions as market promotion, and supporting policy packages for investors and exporters.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara umum sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi pada perekonomian wilayah di Kabupaten Lombok Timur. Kontribusi tersebut sebesar 41,26 % dari nilai PDRB Kabupaten Lombok Timur dan diikuti oleh sektor-sektor lainnya seperti jasa-jasa (16,72 %), perdagangan, hotel dan restoran (7,47 %), industri pengolahan (6,7 %) dan sektor lainnya sebesar 11,25 % (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2002).

Namun bila dikaji lebih rinci, maka subsektor pangan khususnya yang bersumber dari tanaman dataran tinggi seperti bawang putih memberikan kontribusi menurun terhadap perekonomian. Hal ini nampak dari penurunan produksi dan berhentinya ekspor bawang putih setelah tahun 1999. Penurunan produksi bawang putih sangat tajam yaitu mulai dari 65.419 ton pada tahun 1999 menjadi 6.764 ton pada tahun 2003 (BPS NTB, 2004).

Produksi bawang putih yang ada sekarang ini ternyata telah melebihi kebutuhan bawang putih di Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 5.174 ton atau terjadi *over supply* sebesar 30,73% (1.590 ton) setiap tahunnya. Persoalan tersebut menjadi sangat berat bagi pemerintah dan petani karena bagaimanapun juga bahwa bawang putih tersebut termasuk dalam katagori komoditas unggulan yang sangat diperhatikan keberadaannya. Demikian pula dengan kondisi petani yang semakin diperparah oleh *over supply* yang secara tidak langsung tentunya berakibat pada penekanan harga komoditas bawang putih.

Persoalan-persoalan tersebut muncul tentunya tidak terlepas dari kemampuan produk untuk bersaing di pasar regional maupun internasional dan kebijakan nasional atau makro yang dimplementasikan pemerintah, seperti penarikan subsidi input pertanian dan liberalisasi perdagangan untuk komoditas pertanian. Untuk memahami persoalan tersebut, penelitian mengenai keunggulan komparatif dan kompetitif untuk komoditas bawang putih sangat penting untuk dilaksanakan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan mendasar untuk dapat menjawab persolan pengembangan agribisnis bawang putih yaitu :

1. Mengkaji keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas bawang putih di Kabupaten Lombok Timur.
2. Mengkaji dampak dari kebijakan makro pemerintah dalam hal penarikan subsidi dan liberalisasi perdagangan komoditas bawang putih.

Output Penelitian

Output dari penelitian ini yaitu memberikan arahan dan petunjuk bagi pemerintah pada level kabupaten dan propinsi dalam pengembangan komoditas unggulan khususnya bawang putih.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Studi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah *problem solving method* sehingga menghasilkan keputusan untuk memecahkan persoalan yang ada sekarang ini. Untuk menjalankan penelitian ini digunakan teknik survai melalui observasi dan wawancara serta focus group discussion (FGD) yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan dan arahan diskusi kelompok (Ethridge, Don. 1995; Nazir, Moh., 1983).

Daerah dan Petani Sample

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Pemilihan daerah sampel secara purposive sampling atas pertimbangan bahwa Kecamatan Sembalun merupakan satu-satunya sentra produksi bawang putih di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Jumlah petani responden ditentukan sebanyak 10 % dari jumlah populasi petani bawang putih yang ada pada tiga desa sampel yaitu Desa Sembalun Lawang, Sembalun Bumbung dan Desa Sajang. Adapun jumlah petani responden pada masing-masing desa sampel ditentukan secara proporsional random sampling berdasarkan sebaran jumlah petani pada masing-masing desa sampel. Dengan demikian, dari 85 petani sampel yang ditentukan terdapat 14 petani responden di Desa Sembalun Bumbung; 58 petani responden di Desa Sembalun Lawang; dan 13 petani responden di Desa Sajang.

Variabel dan Cara Pengukurannya

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel yang membangun biaya dan penerimaan dari usahatani yang dinilai secara ekonomi (nilai privat dan nilai sosial). Nilai privat merupakan nilai riil dari hasil penelitian atau observasi di lapangan, sedangkan nilai sosial merupakan nilai yang ditentukan melalui pendekatan harga bayangan (*shadow price*).

Dengan demikian, maka variabel dalam penelitian adalah biaya produksi yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap yang dinilai dalam rupiah per hektar. Sementara itu, variabel lainnya berupa penerimaan usahatani yang terdiri dari harga dan jumlah produksi yang dinilai dalam rupiah per hektar .

Metode Analisis

Keunggulan komparatif dalam usahatani dalam penelitian ini merupakan kemampuan usahatani dalam menghasilkan nilai output atau keuntungan secara regional atas biaya pengorbanan input domestik yang digunakannya. Sementara itu, keunggulan kompetitif dalam usahatani adalah kemampuan usahatani dalam menghasilkan nilai output atau keuntungan atas biaya pengorbanan input tradable yang digunakannya (Pearson, Scott; Gotsch, Carl and Bahri, Sjaiful, 2004)

Pendekatan analisis data yang cukup efisien dan efektif untuk menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif serta pengaruh dari kebijakan adalah Metode Policy Analysis Matrix (PAM) seperti yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Policy Analysis Matrix atau Matriks Analisis Kebijakan (PAM)

Elements	Revenue	Tradable Inputs	Domestic Factors	Profit
Private Price	A	B	C	D
Social Price	E	F	G	H
Divergences	I	J	K	L

Sumber: Mongke and S.R. Pearson (1995)

Keterangan :

- ◆ Private Profit (D) = A – B – C
- ◆ Social Profit (H)= E – F – G
- ◆ Output Transfer (I)= A – E
- ◆ Input Transfer (J) = B – F
- ◆ Factor Transfer (K) = C – G
- ◆ Net Transfer (L) = D – H
- ◆ Private Cost Ratio (PCR) = C/(A-B)
- ◆ Nominal Protection Coefficient Output (NPCO) = A / E
- ◆ Nominal Protection Coefficient Input (NPCI) = B/F
- ◆ Effective Protection Coefficient (EPC) = (A-B)/(E-F)
- ◆ Subsidy Ratio to Producer (SRP) = L/E
- ◆ Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) = G/(E-F)
- ◆ Profitability Coefficient (PC) = D / H

Kelebihan metode PAM adalah mampu menyajikan beberapa koefisien yang berkaitan dengan tujuan tersebut yaitu koefisien DRRCR (*Domestic Resource Cost Ratio*) sebagai indikator keunggulan komparatif dan koefisien PCR (*Private Cost Ratio*) sebagai indikator keunggulan kompetitif. Sementara itu, untuk melihat dampak kebijakan pemerintah menggunakan indikator NPCO (*Nominal Protection Output*), NPCI (*Nominal Protection Input*), EPC (*Effective Protection Coefficient*), PC (*Profitability Coefficient*) dan SRP (*Subsidy Ratio to Produser*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Usahatani dan Pasar Bawang Putih

Usahatani bawang putih hanya terdapat di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dan tersebar pada tiga desa yaitu Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun Bumbung dan Desa Sajang. Potensi lahan untuk usahatani bawang putih seluas 44.861 hektar dan luas pemanfaatan hanya 498 hektar atau 1,11% dari potensi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan lahan untuk usahatani bawang putih pada tingkat petani sekitar 61% dari luas pemilikan. Artinya, petani tidak saja menanam bawang putih pada lahan usahatani, tetapi menanam tanaman sayuran lain sekitar 39% dari luas lahan yang dimiliki.

Keadaan ini memberikan makna bahwa petani di Kecamatan Sembalun telah mengurangi areal tanam bawang putih dan digantikan dengan tanaman lainnya dengan proporsi luas yang lebih rendah. Dari fakta yang ada bahwa luas pemilikan dan pengelolaan lahan pada tingkat petani di Kecamatan Sembalun rata-rata sekitar 54 are dan hanya 33 are dimanfaatkan untuk usahatani bawang putih.

Kemudian dari aspek pemasaran komoditas bawang putih, ternyata petani tidak lagi menjual bawang putih langsung ke perusahaan (sebagai mitra) sebelum tahun 2000, akan tetapi sekarang ini petani hanya dapat menjual hasil usahatani kedagang perantara dengan rantai pemasaran melalui pedagang pengumpul kecamatan, pengumpul kota dan pedagang pengeser. Meskipun petani dapat menjual produksi bawang putih dengan lancar, namun kepastian harga yang diterima petani cukup bervariasi setiap tahunnya. Variasi harga per kilogram bawang putih kering di Kecamatan Sembalun mulai dari Rp.2000,- sampai Rp.3000,- atau harga rata-rata yang diterima oleh petani sekitar Rp.2.500,- per kilogram kering.

Bila dikaitkan dengan harga bawang putih kering per kilogram ditingkat konsumen untuk Propinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2000-2003 yang berkisar dari Rp.8.500,- sampai dengan Rp.9.500,-, Hal ini menunjukkan indikasi bahwa besarnya margin pemasaran komoditas bawang putih, dimana petani hanya menentukan harga sebesar 23,5% -

31,58% saja dari harga konsumen yang ada. Implikasi dari data yang ada, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar keuntungan usahatani bawang putih dinikmati oleh lembaga pemasaran yang ada.

Pendapatan Usahatani Bawang Putih

Usahatani bawang putih di Kabupaten Lombok Timur masih menguntungkan untuk diusahakan. Keadaan ini terlihat (pada baris *private price* dalam tabel 2) dari pendapatan bersih (*private profit*) per hektar lahan sebesar Rp. 4.206.793,- dengan perincian bahwa nilai penerimaan sebesar Rp.20.361.055,- yang bersumber dari produksi sebesar 8.144,50 kilogram bawang putih kering tanpa daun dan rata-rata harga sekitar Rp. 2.499,98 per kilogram.

Tabel 2. Hasil Analisis PAM Usahatani Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003

Elements	Revenue	Tradable Inputs	Domestic Factors				Profit	
			Labor	Depresiasi	Capital	Land		Total
Private Price	20.361.055	5.400.729	5.658.725	988862	1.105.945	3.000.000	10.753.532	4206793
Social Price	18.189.552	6.888.719	5.658.725	988862	573.022	3.000.000	10.220.609	1080224
Divergences	2.171.503	-1.487.990	0	0	532.923	0	532.923	3126569

Sumber. Analisis Data Primer dan Sekunder.

Sementara itu, total biaya sebesar Rp16.154.262. Dari keseluruhan biaya produksi dalam usahatani bawang putih (Rp16.154.262,-) terlihat bahwa sebagian kecil yaitu sekitar 35,03% merupakan biaya input tradable dan sekitar 64,97% merupakan biaya untuk faktor domestik. Input tradable terdiri dari biaya benih, pupuk dan pestisida, sedangkan biaya faktor domestik berupa biaya tenaga kerja, penyusutan alat, bunga modal dan sewa lahan.

Tabel 2 pada baris *social price* menunjukkan bahwa usahatani bawang putih masih efisien untuk diusahakan di Kabupaten Lombok Timur. Indikator keseluruhan adalah nilai keuntungan sosial (*social profit*) positif yaitu sebesar Rp.1.080.224,- per hektar lahan. Jika dibandingkan antara keuntungan privat dan keuntungan sosial, terlihat bahwa keuntungan sosial lebih rendah daripada keuntungan privat. Lebih rendahnya nilai *social profit* daripada *private profit* disebabkan dua faktor utama yaitu karena lebih rendahnya harga internasional bawang putih yaitu hanya 89,34% (Rp.2.233,35) dari harga bawang pada tingkat petani dan tingkat bunga yang diterima petani lebih tinggi daripada yang seharusnya. Tingkat bunga riel yang diterima oleh petani sebesar 10% per musim dan tingkat bunga riel yang seharusnya sebesar 5,5% per musim. Nilai tingkat bunga

internasional diperoleh dari tingkat bunga yang berlaku pada negara tetangga terdekat yaitu Malaysia.

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Bawang Putih

Keunggulan komparatif dan kompetitif merupakan indikator dari daya saing suatu komoditas. Keunggulan komparatif dalam analisis PAM merupakan ukuran tingkat efisiensi ekonomi komoditas bawang putih dipasaran internasional, sedangkan keunggulan kompetitif juga merupakan refleksi dari keunggulan komoditas secara teknis untuk diusahakan dalam pemanfaatan input tradable. Keunggulan komparatif diukur dengan angka DRCR (Domestic Resource Cost Ratio). Bila nilai DRCR lebih kecil dari satu memberikan makna bahwa memproduksi bawang putih di Kabupaten Lombok Timur adalah efisien dipandang dari penggunaan faktor domestik atau sebaliknya. Sementara itu, keunggulan kompetitif dalam analisis PAM diukur dengan koefisien PCR (Private Coefficient Ratio). Bila nilai dari koefisien PCR kurang dari satu memberikan makna bahwa suatu komoditas bawang putih memiliki keunggulan kompetitif di perdagangan internasional.

Tabel 3. Koefisien DRCR dan PCR Usahatani Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003

No	Koefisien	Nilai
1	DRCR (Domestic Resource Cost Ratio)	0,90
2	PCR (Private Cost Ratio)	0,72

Sumber. Analisis PAM Bawang Putih.

Hasil analisis PAM pada tabel 3 menunjukkan bahwa kedua koefisien baik DRCR maupun PCR positif dan kurang dari satu. Secara umum nilai kedua koefisien tersebut memberikan makna bahwa komoditas bawang putih memiliki daya saing, karena lebih efisien dari aspek teknis dan menguntungkan untuk diusahakan serta lebih efisien dalam penggunaan (faktor domestik) atau efisien dalam penggunaan devisa negara bila diproduksi dalam negeri. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa agribisnis bawang putih di Kecamatan Sembalun layak untuk dikembangkan dengan orientasi bukan pada pasar lokal karena pasar lokal telah jenuh, akan tetapi sebaiknya berorientasi pada pasar internasional karena nilai keuntungan sosial yang masih pada posisi menguntungkan (Rp. 1.080.224,- per hektar).

Jika usaha pengembangan agribisnis bawang putih dengan orientasi produk adalah pasar lokal, maka akan terjadi kelebihan produksi yang sangat tajam daripada permintaan (terjadi *over supply*). Permintaan

komoditas bawang putih di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2003 sejumlah 5.174 ton, sedangkan produksi bawang putih sebesar 6.764 ton atau telah terjadi kelebihan produksi sebesar 30,73% dari permintaannya atau 1.590 ton setiap tahunnya (BPS NTB, 2003).

Dari hasil analisis ditemukan bahwa koefisien DRCR sebesar 0,90 memberikan arti bahwa komoditas bawang putih memiliki keunggulan komparatif karena dari aspek ekonomi cukup efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik atau bawang putih lebih efisien diproduksi dalam negeri daripada dilakukan impor. Implikasi ekonomi dari nilai DRCR tersebut adalah untuk menghasilkan devisa satu satuan hanya dibutuhkan faktor domestik hanya sebesar 0,90 satuan dari aktivitas agribisnis bawang putih. Selisih nilai sebesar 0,1 atau 10% tersebut merupakan nilai tambah yang diperoleh negara dengan melakukan aktivitas usahatani bawang putih dalam negeri. Dengan kata lain bahwa pengembangan agribisnis di dalam negeri mampu mendatangkan devisa sebesar 10% untuk setiap hektar lahan yang diusahakan.

Kemudian dari tabel 3 juga terlihat bahwa nilai koefisien PCR sebesar 0,72 memberikan makna bahwa agribisnis bawang putih memiliki keunggulan kompetitif karena secara teknis usahatani bawang putih tersebut cukup efisien dan secara finansial menguntungkan. Besarnya nilai koefisien tersebut juga memberikan makna bahwa untuk menghasilkan nilai tambah output sebesar satu satuan hanya dibutuhkan tambahan biaya input tradable sebesar 0,72 satuan. Nilai tambah output bawang putih sebesar 0,28 atau 28% merupakan tingkat efisiensi teknis dari penggunaan input tradable seperti pupuk dan pestisida pada usahatani bawang putih di Kabupaten Lombok Timur.

Dampak Kebijakan Pemerintah pada Perdagangan Bawang Putih

Instrumen kebijakan pemerintah yang cukup populer dibidang pertanian sekarang adalah pengurangan subsidi input pertanian, sedangkan kebijakan pemerintah dalam perdagangan adalah liberalisasi perdagangan komoditas pertanian kecuali beras. Pembentukan harga input maupun harga output diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku. Keadaan ini tentunya berakibat pada munculnya kesenjangan antara harga yang diterima dengan harga yang seharusnya diterima oleh produsen (harga sosial). Secara keseluruhan dampak kebijakan input dan output pemerintah nampak pada 5 koefisien dalam tabel 4 berikut.

Pengaruh keseluruhan kebijakan pemerintah tersebut terlihat dari nilai koefisien EPC (Effective Protection Coefficient) , PC (Profitability Coefficient) dan SRP (Subsidy Ratio to Producer). Apabila nilai EPC lebih besar dari satu memberikan makna bahwa dampak keseluruhan dari kebijakan pemerintah dalam pembentukan harga dan mekanisme pasar

komoditas memberikan insentif (perlindungan) terhadap produsen terutama dalam pengembangan usahatani, sebaliknya bila nilai EPC kurang dari satu memberikan makna bahwa kebijakan pemerintah memberikan disinsentif.

Tabel 4. Koefisien Dampak Kebijakan Pada Usahatani dan Perdagangan Komoditas Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003

No	Koefisien	Nilai
1	Effective Protection Coefficient (EPC)	1,32
2	Profitability Coefficient (PC)	3,89
3	Subsidy Ratio to Producer (SRP)	0,17
4	Nominal Protection Coefficient Output (NPCO)	1,12
5	Nominal Protection Coefficient Input (NPCI)	0,78

Sumber. Analisis PAM Bawang Putih

Hasil analisis pada tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai koefisien EPC lebih besar satu yaitu 1,32. Nilai koefisien EPC tersebut memberikan makna bahwa kebijakan pemerintah pada pasar input dan output masih memberikan insentif pada petani perodusen dalam mengembangkan agribisnis bawang putih. Insentif tersebut dapat berupa perlindungan yang menguntungkan petani produsen. Petani produsen menerima insentif sebesar 32% sebagai akibat keseluruhan dari kebijakan pemerintah pada pasar input dan pasar output. Keadaan ini didukung pula oleh nilai PC yang positif dan lebih besar satu (3,89). Nilai PC tersebut memberikan makna bahwa petani produsen menerima keuntungan 3,89 kali dari keuntungan pada harga sosial. Keuntungan usahatani yang diterima oleh petani produsen sebesar Rp.4.206.793,-, sedangkan keuntungan yang seharusnya adalah sebesar Rp.1.080.224,-. Dengan kebijakan yang sekarang ini, produsen seolah-olah tersubsidi sebesar 0,17 atau 17% (SRP) untuk setiap hektar dari agribisnis bawang putih yang diusahakan di Kabupaten Lombok Timur.

Nilai EPC hanya memperlihatkan dampak secara keseluruhan dari sebuah kebijakan dan akibat kebijakan tersebut dapat saling menutupi satu sama lainnya sehingga tidak terlihat secara jelas kebijakan yang mana yang menghasilkan dampak tersebut. Oleh karena itu untuk melihat lebih detail dampak kebijakan, maka harus dipandang secara terpisah kebijakan tersebut. Untuk kebutuhan tersebut, maka indikator penting dari dampak kebijakan terlihat pada koefisien NPCO (Nominal Protection Coefficient Output dan NPCI (Nominal Protection Coefficient Input).

Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai koefisien NPCO sebesar 1,12, artinya bahwa petani produsen menerima pendapatan kotor lebih tinggi 12% dari pendapatan kotor yang seharusnya. Makna dari nilai koefisien tersebut adalah kebijakan pemerintah dalam liberalisasi pasar komoditas pertanian (tanpa barrier dan kuota) khususnya bawang putih justru berdampak positif terhadap petani produsen (produsen dilindungi). Kebijakan pemerintah tersebut sesungguhnya melindungi harga dalam negeri dari komoditas bawang putih, sehingga harga yang diterima petani produsen lebih tinggi daripada harga yang sesungguhnya (harga internasional)

Kemudian dampak kebijakan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar input tradable terlihat dari nilai koefisien NPCI (Nominal Protection Coefficient Input) dalam tabel 4. Nilai divergensi negatif artinya bahwa nilai koefisien NPCI adalah kurang dari satu (0,78). Makna dari nilai NPCI tersebut adalah kebijakan pemerintah yang menarik subsidi pada input tradable menyebabkan harga input yang diterima petani produsen lebih rendah (22 %) dari harga yang sesungguhnya. Kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi input tradable (pupuk dan pestisida) tidak menyengsarakan petani, karena pada waktu yang sama pemerintah juga memberlakukan tarif impor sebesar 20% pada input berupa pupuk dan pestisida (Budastra, Ketut dan Bambang Dipokusumo, 2004).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terbatas pada hasil Analisa PAM dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut :

1. Agribisnis bawang putih yang diusahakan di Kabupaten Lombok Timur, khususnya di Kecamatan Sembalun memiliki daya saing karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan nilai DRCR dan PCR masing-masing sebesar 0,90 dan 0,72.
2. Kebijakan pemerintah dalam pasar input dan pasar output secara keseluruhan memberikan dampak positif berupa insentif bagi petani produsen bawang putih, sehingga menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp.4.206.793,- per hektar atau 389% dari keuntungan bersih yang seharusnya.
3. Kebijakan pemerintah pada pasar output dalam hal liberalisasi dan diberlakukannya tarif impor (20%) pada input masih memberikan keuntungan pada tingkat petani (harga privat) dan harga sosial, sehingga agribisnis bawang putih masih memiliki prospek untuk dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur.

Saran

Mengingat bahwa bawang putih yang diusahakan di Kecamatan Sembalun masih memiliki daya saing untuk dikembangkan, maka disarankan bahwa pemerintah sebaiknya ikut terlibat dalam hal promosi dalam dan luar negeri. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya memberikan bantuan berupa paket kebijakan, sehingga dapat memberikan dorongan kepada investor dan ekportir bawang putih untuk memproduksi lebih produktif. Dengan intervensi pemerintah tersebut diharapkan dapat merangsang petani maupun investor untuk mengembangkan agribisnis bawang putih yang sekarang ini memperlihatkan kelesuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2003. Laporan Tahunan Exchange Rate 2002. Bank Indonesia Mataram. Mataram
- BPS Jakarta, 2003. Statistik Harga Konsumen Pedesaan di Indonesia 1996-2002. Biro Pusat Statistik Jakarta. Jakarta.
- BPS Kabupaten Lombok Timur, 2001. Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2001. Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur. Selong.
- _____, 2002. Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2002. Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur. Selong.
- BPS Propinsi NTB, 2002. Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Barat. BPS Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- _____, 2004. Neraca Konsumsi Bahan Makanan. BPS Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- Budastra, Ketut and Bambang Dipokusumo, 2004. Impact of Liberalization on Cashew System in West Nusa Tenggara within Pearson, Scott; Gotsch, Carl; Sjaiful Bahri, 2004. Application of The Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Dinas Pertanian Propinsi NTB, 2001. Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001-2005. Dinas Pertanian NTB. Mataram
- Ethridge, Don. 1995. Research Methodology In Applied Economics. Organizing, Planning, and Conducting Economic Research. Iowa State University Press.
- Monke, Eric A. and R. Pearson, Scott. 1995 The Policy Analysis Matrix For Agricultural Development Cornell University Press.

Nazir, Moh., 1983. Metode Penelitian. Balai Pustaka-Yudistira dan Pustaka Saadiyah. Jakarta Timur.

Pearson, Scott; Gotsch, Carl and Bahri, Sjaful, 2004. Application of The Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.